KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Polri Sudah Tunjukkan Langkah Tegas Preventif
Tanggal : Kamis, 05 November 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Larang Anggota Pake Vape

Polri Sudah Tunjukkan Langkah Tegas Preventif

SENAYAN mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menerbitkan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel kepolisian. Kebijakan tersebut merupakan langkah preventif atau pencegahan, terutama dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang kini dapat memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengatakan, Polri telah menunjukkan langkah tegas dalam upaya pencegahan. Sebagai institusi penegak hukum, Polri perlu memberikan contoh kepada masyarakat bahwa pencegahan narkotika mesti dimulai dari kedisiplinan dan keteladanan di lingkungan sendiri.

Menurut Adang, perhatian terhadap vape perlu diperkuat karena perangkat tersebut berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dalam bentuk cair. "Kandungan zat terlarang dapat disamarkan dalam liquid atau cartridge sehingga secara kasatmata sulit dibedakan dari cairan vape biasa," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sebelumnya, Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui surat edaran pada 30 Oktober 2026, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Salah satu pertimbangan kebijakan ini adalah temuan penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, termasuk etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II. Bagi anggota polisi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Adang melanjutkan, ancaman tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan terbatas pada pengguna vape semata. Perkembangan modus peredaran narkotika berpotensi menyasar berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Sehingga, diperlukan langkah pencegahan yang konsisten melalui edukasi, penga-



FOTO: TEDY KROENIAWAN/RM.ID

Adang Daradjatun

wasan, dan penegakan hukum.

Ia mengingatkan, jangan sampai perangkat yang terlihat seperti rokok elektrik biasa justru menjadi sarana penyebaran narkotika. "Kita mesti tegas dalam pencegahan, memperkuat pengawasan terhadap peredaran cairan yang mencurigakan, dan memastikan masyarakat memahami risiko yang ada," kata politisi PKS ini.

Karena itu, Adang menekankan, sinergi antara Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Penindakan terhadap jaringan peredaran mesti berjalan seiring dengan upaya edukasi dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Adang berharap, kebijakan internal Polri tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten dan menjadi contoh bagi institusi maupun lingkungan masyarakat lainnya. Karena komitmen pemberantasan narkotika perlu diwujudkan bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam membangun budaya pencegahan.

Dia menegaskan, pencegahan narkotika membutuhkan keteguhan dan keteladanan. "Kita mesti menjaga lingkungan tetap aman, melindungi generasi muda, dan memastikan setiap upaya pencegahan dilakukan secara bersama-sama," imbuh legislator asal DKI Jakarta ini.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Pemerintah membuat regulasi secara tegas untuk melarang penggunaan vape yang mengandung narkotika cair. Juga melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda supaya terhindar dari bahaya penggunaan narkotika cair tersebut. Terlebih, penggunaan vape di kalangan anak muda sudah menjadi trend dan budaya atau gaya hidup. "Kami ingin rantai penyebaran narkotika untuk diputus," tegas Yahya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tambah Yahya, juga mesti melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran narkotika cair. Bila ditemukan ada produsen yang melakukan pelanggaran bisa dicabut izin edarnya.

Menurutnya, perlu ada langkah yang tegas dalam memberantas penyebaran narkotika tersebut. Karena itu, Polri dan BNN agar melakukan operasi lapangan untuk memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika cair dan produsen yang memproduksi vape tersebut. "Jka terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana, kami mendesak Polri untuk menindak secara hukum dan pabriknya ditutup," tegas politisi Golkar ini. ■ TIF